

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Sumbawa Besar

Jl. Garuda No. 107 84316 082341263515

<https://djob.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat / Kantor

Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Sumbawa Besar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP
2. Copy Surat Keputusan SK Pindah Pensiun
3. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier
4. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP
5. Copy Surat Keputusan SK Pindah Pensiun
6. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier
7. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP
8. Copy Surat Keputusan SK Pindah Pensiun
9. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Sumbawa Besar

Jl. Garuda No. 107 84316 082341263515

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat / Kantor

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Sumbawa Besar

1. Satuan Kerja mengajukan SKPP beserta dokumen pendukung dari Satker termasuk Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier dari Satker melalui aplikasi GPP BPP DPP satker
2. Petugas KPPN akan memeriksa kelengkapan dokumen Jika terdapat kekurangan atau kesalahan maka dokumen akan dikembalikan melalui aplikasi
3. Apabila berkas sudah benar petugas KPPN akan meneruskan persetujuan dokumen ke Kepala Seksi PDMS untuk dilakukan approve
4. Setelah dilakukan approve satuan kerja dapat langsung mengunduh berkas SKPP yang telah ditandatangani secara elektronik di aplikasi dan meneruskannya ke satker baru atau ke PT Taspen ASABRI sesuai peruntukannya
5. Satuan Kerja mengajukan SKPP beserta dokumen pendukung dari Satker termasuk Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier dari Satker melalui aplikasi GPP BPP DPP satker
6. Petugas KPPN akan memeriksa kelengkapan dokumen Jika terdapat kekurangan atau kesalahan maka dokumen akan dikembalikan melalui aplikasi
7. Apabila berkas sudah benar petugas KPPN akan meneruskan persetujuan dokumen ke Kepala Seksi PDMS untuk dilakukan approve
8. Setelah dilakukan approve satuan kerja dapat langsung mengunduh berkas SKPP yang telah ditandatangani secara elektronik di aplikasi dan meneruskannya ke satker baru atau ke PT Taspen ASABRI sesuai peruntukannya
9. Satuan Kerja mengajukan SKPP beserta dokumen pendukung dari Satker termasuk Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier dari Satker melalui aplikasi GPP BPP DPP satker
10. Petugas KPPN akan memeriksa kelengkapan dokumen Jika terdapat kekurangan atau kesalahan maka dokumen akan dikembalikan melalui aplikasi
11. Apabila berkas sudah benar petugas KPPN akan meneruskan persetujuan dokumen ke Kepala Seksi PDMS untuk dilakukan approve
12. Setelah dilakukan approve satuan kerja dapat langsung mengunduh berkas SKPP yang telah ditandatangani secara elektronik di aplikasi dan meneruskannya ke satker baru atau ke PT Taspen ASABRI sesuai peruntukannya

Waktu Penyelesaian

0

Satu hari kerja sejak SKPP telah diterima lengkap dan benar

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Sumbawa Besar

Jl. Garuda No. 107 84316 082341263515

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat / Kantor

Biaya / Tarif Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Sumbawa Besar

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan SKPP

Pengaduan Layanan

1. Telepon/sms : 082341263515
2. Email : layanan.aduan.kppnsumbawa@gmail.com
3. Situs : <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar/id/>
4. SIPANDU : pengaduandjpb.kemenkeu.go.id
5. WISE : wise.kemenkeu.go.id
6. SP4N LAPOR! : lapor.go.id